



Pentingnya Strategi dan Kebijakan Digital Nasional

Praktisi : Nurul Aulia Sani, S.E, M.Si

Dosen : Siti Aisyah Nasution, S.E., M.Si.



KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG INFRASTRUKTUR TRANSFORMASI DIGITAL

Laksamana Muda TNI (Purn) Ir. Leonardi M.Sc.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan RI

DISAMPAIKAN DALAM
FORUM KOORDINASI SINKRONISASI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RABU, 10 NOVEMBER 2021



ZAMAN DIGITAL: WORK IN SPEED, CHANGE AND ADAPTIVE

Global Megatrend

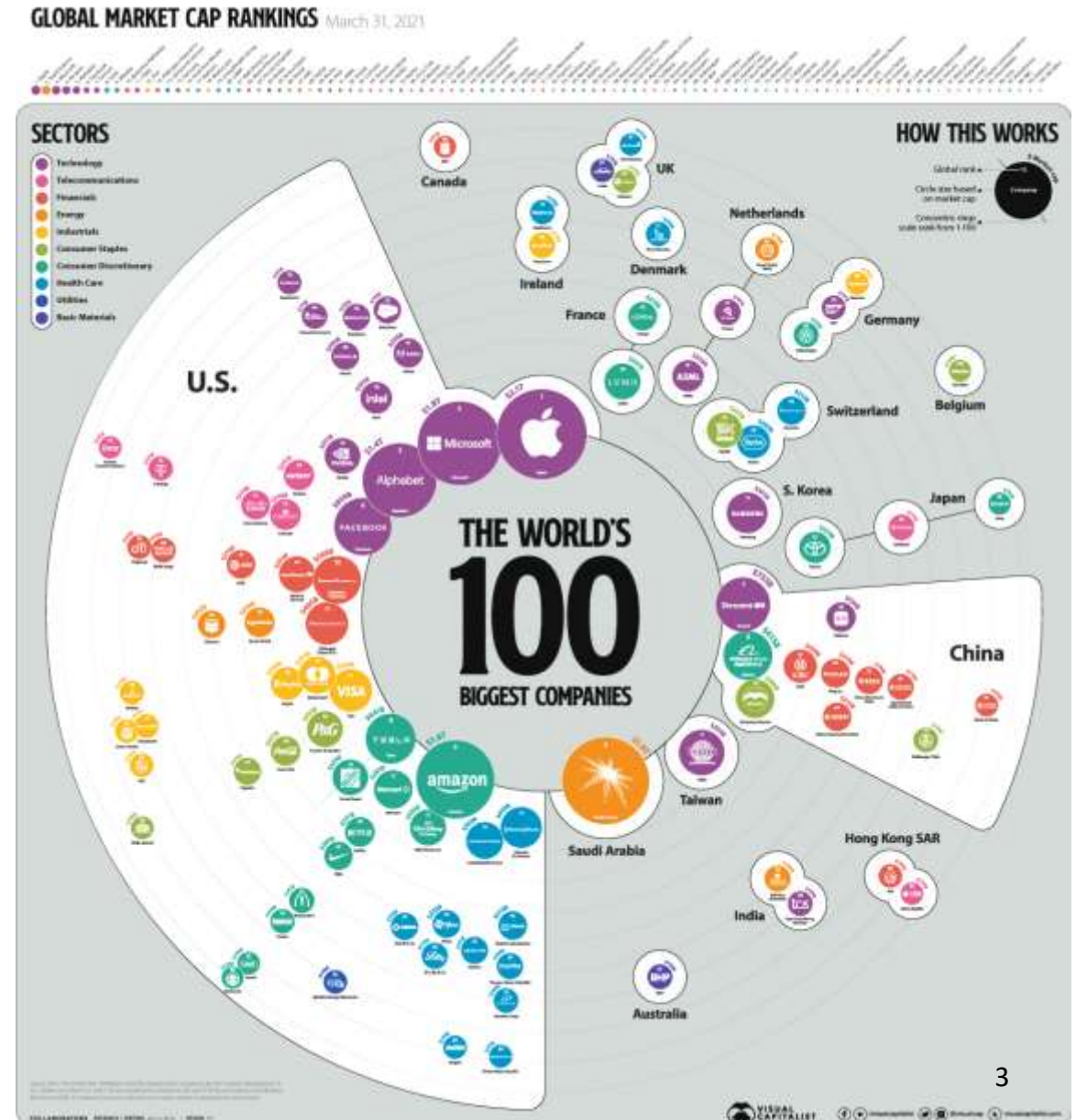
Di era saat ini dan yang akan datang, dunia berubah begitu cepat.

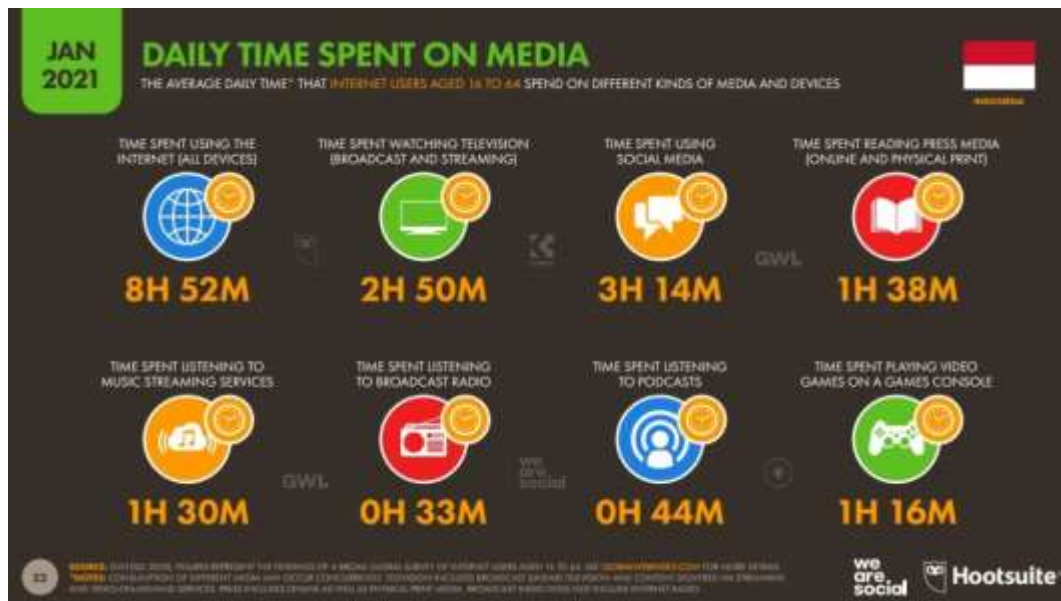
Perusahaan terbesar di dunia (*Global Market Cap*) didominasi oleh penguasa data dan teknologi informasi. (Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet dan Facebook)

Digitalisasi adalah penggerak ekonomi dunia.

Penguasaan terhadap data dan digitalisasi adalah keniscayaan agar tetap relevan untuk menghadapi tantangan di masa sulit, seperti saat pandemi dan *post* pandemi covid-19 yang penuh ketidakpastian.

[Sumber: Visual Capitalist, 2021](#)





- Pengguna HP: 345,3 juta (125,6% dari jumlah populasi di Indonesia)
 - Pengguna Internet: 202,6 juta (73,7% dari jumlah populasi di Indonesia)
 - Pengguna Media Sosial Aktif: 170 juta (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia)
-
- Rata-rata setiap hari waktu menggunakan internet : 8 jam, 52 menit.
 - Rata-rata setiap hari waktu melihat televisi (*broadcast, streaming, dan video*): 2 jam, 50 menit.
 - Rata-rata setiap hari waktu menggunakan media sosial melalui perangkat apa pun: 3 jam, 41 menit.



INDONESIA DALAM DUNIA DIGITAL

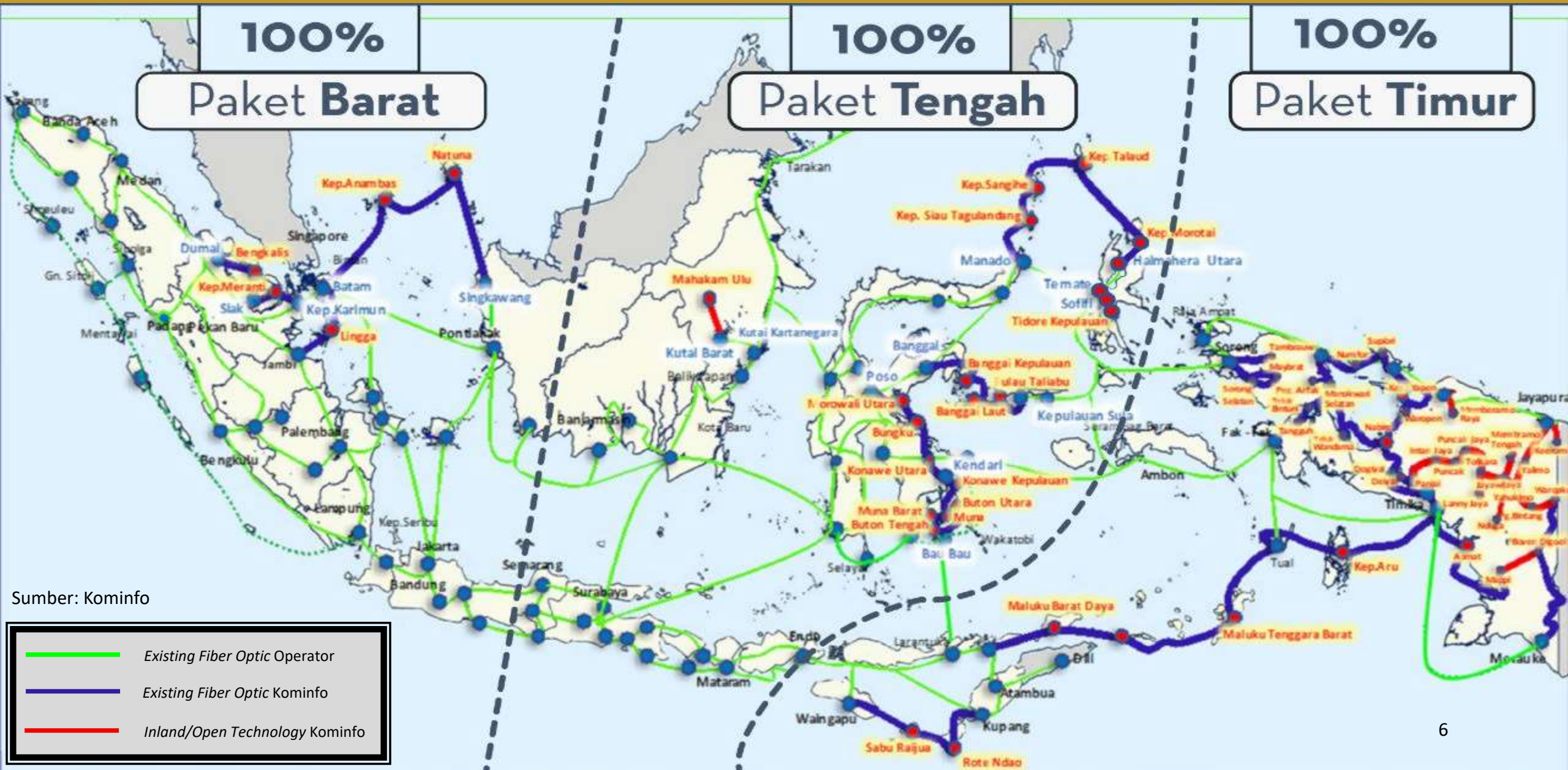


Sumber: Hootsuite, 2021

- *Travel, Mobility & Akomodasi*: USD 6,02 Miliar atau Rp 86,5 Triliun
- *Fashion & Kecantikan*: USD 9,81 Miliar atau Rp 141 Triliun
- *Elektronik & Peralatan Media Sosial*: USD 6,91 Miliar atau Rp 99,309 Triliun
- *Makanan & Kebutuhan lainnya*: USD 4,66 Miliar atau Rp 66,973 Triliun
- *Furniture & Peralatan lainnya*: USD 4,48 Miliar atau Rp 64,386 Triliun
- *Mainan, DIY & Hobi lainnya*: USD 4,44 Miliar atau Rp 63,811 Triliun
- *Musik Digital*: USD 199,5 Juta atau Rp 2,867 Triliun
- *Video Games*: USD 1,68 Miliar atau Rp 24,144 Triliun



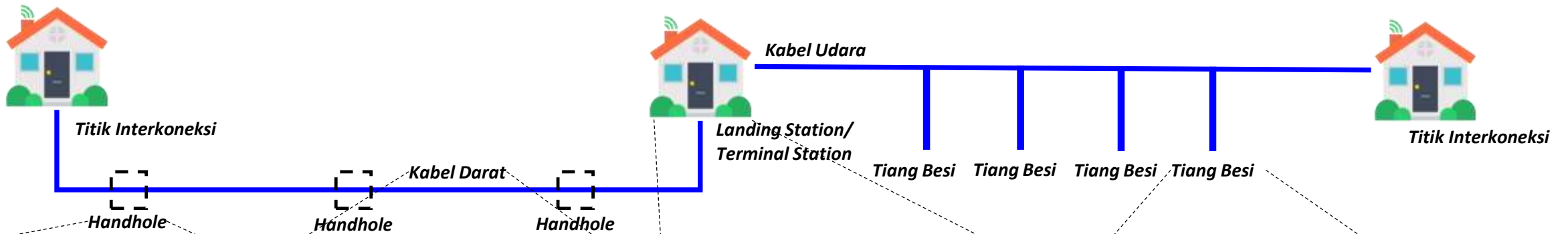
PETA FIBER OPTIK INDONESIA (PALAPA RING)





KONSTRUKSI YANG DIBANGUN PEMERINTAH

► SISTEM KOMUNIKASI SERAT OPTIK (SKSO)



Handhole



Penggalian untuk Penanaman Pipa HDPE



Bangunan Titik Interkoneksi atau Landing Station/Terminal Station

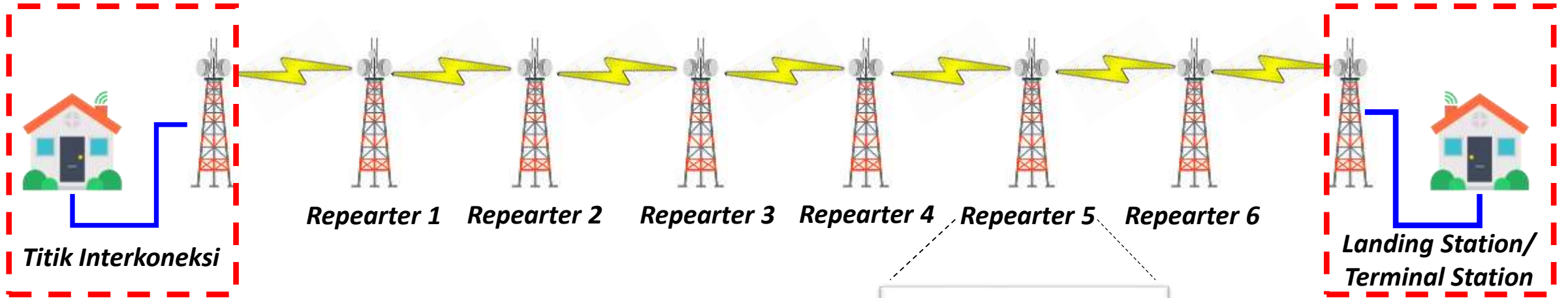


Instalasi Kabel Udara pada Tiang



KONSTRUKSI YANG DIBANGUN PEMERINTAH

RADIO MICROWAVE



Menara Telekomunikasi



VISI TERKAIT TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL, RPJMN 2020-2024

VISI

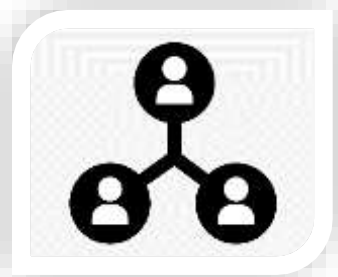
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Highlight Sasaran Transformasi Digital 2024



95% Desa

Terjangkau Infrastruktur
Jaringan Bergerak Pita Lebar



60% Kecamatan

Cakupan Jaringan Tetap Pita Lebar



80% Populasi

terjangkau
Siaran Digital



3 Start Up

Siaran Digital



ARAHAN KEBIJAKAN RPJMN 2020-2024

Pengarusutamaan



Mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Arah Kebijakan Rangka Penyediaan Fasilitas Pendukung Transformasi digital:

Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dll) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui:

- Mendorong pelaksanaan ***satu data*** dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar serta dapat dibagipakaikan;
- Mendorong pemanfaatan analisa dari ***Big Data*** untuk meningkatkan ketepatan perencanaan, kinerja pelaksanaan pembangunan maupun ketepatan pengawasan pembangunan; dan
- Mendorong terbentuknya ***dashboard data nasional*** untuk mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan berbasis data yang saling interoperabilitas, terstandar, serta dapat dibagipakaikan.



STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

Strategi Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Transformasi Digital dalam RPJMN 2020-2024 (Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020):

- Penuntasan Infrastruktur TIK
- Pemanfaatan Infrastruktur TIK
- Fasilitas Pendukung Transformasi Digital



PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (*MAJOR PROJECT*)

<i>MAJOR PROJECT</i>	MANFAAT	PENDANAAN (RP TRILIUN)	PELAKSANA
Infrastruktur TIK untuk mendukung Transformasi Digital.	• Berkurangnya Kesenjangan Digital • Menyediakan Layanan Internet internet cepat untuk mendukung digitalisasi sektor ekonomi, sosial, dan pemerintahan	• APBN: 7,2 • Badan Usaha: 428,0	• Kementerian Komunikasi dan Informatika • Badan Usaha (BUMN/Swasta) • K/L terkait



5 ARAHAN PRESIDEN MENGENAI TRANSFORMASI DIGITAL



Segera lakukan percepatan perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, dan percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau keluarahan, serta di titik-titik layanan publik.



Siapkan *roadmap* transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor Pendidikan, sektor kesehatan, sektor perdagangan, sektor industri, dan sektor penyiaran.



Percepat integrasi Pusat Data Nasional.

Pusat Data Nasional akan mengintegrasikan 2700 data center pemerintah yang tersebar di Pusat dan Daerah



Siapkan kebutuhan *talenta digital*
Kebutuhan sumber daya manusia *talenta digital* diproyeksikan mencapai 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan.



Siapkan regulasi, skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital.



SINKRONISASI ANTAR REGULASI PUSAT-DAERAH

UU No. 10 Tahun 2021

Tentang Cipta Kerja



PP No. 21 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

PM Dalam Negeri No. 4 Tahun 2019

Tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam
Perencanaan Tata Ruang Daerah

**Perlu
Sinkronisasi**

Peraturan Daerah

Penyusunan RTR
Provinsi dan Kabupaten/
Kota yang terdiri dari:

- Provinsi:
 - RTRWP;
 - RTRKSP; dan
 - RZWP3K.
- Kabupaten/Kota:
 - RTRWK/K;
 - RTRKSK/K; dan
 - RDTRK/K dan Peraturan Zonasi.



SINKRONISASI ANTAR REGULASI PUSAT-DAERAH

UU No. 10 Tahun 2021

Tentang Cipta Kerja

PP No. 6 Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan
Izin Berusaha di Daerah

PM Dalam Negeri
No. 25 Tahun 2021

Tentang Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PP No. 46 Tahun 2021

Tentang Pos, Telekomunikasi
dan Penyiaran

PM Kominfo No. 5
Tahun 2021

Tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi

**Perlu
Sinkronisasi**

Peraturan Daerah

- Pengenaan Retribusi
- Sewa Lahan
- Sewa Jaringan Utilitas Terpadu
- Pengawasan, Pembinaan dan Penegakan di Lapangan



IMPLEMENTASI REGULASI

Sinkronisasi Antar Regulasi Pusat-Daerah



Sesuai UU Ciptaker Tarif Sarana Jasa Utilitas Terpadu (SJUT) ditetapkan dalam Perda. Hal ini perlu dibahas bersama melibatkan seluruh *stakeholder* (biaya yang wajar, tidak menghambat investasi, dan tidak merugikan publik).

Pelaksanaan UU Cipta Kerja memerlukan kebijakan turunan yang tepat, Pasal 21 PP 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.

“Penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan menyediakan fasilitas untuk digunakan Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa tanah, bangunan, dan/atau infrastruktur pasif telekomunikasi”.

CONTOH KASUS

Pemprov DKI Jakarta

Rancangan Peraturan Daerah mengenai tarif SJUT di Jakarta sedang disusun bersama dengan DPRD untuk menggantikan **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999** tentang jaringan utilitas.

Skema tarif yang sedang disusun oleh Pemprov dan DPRD adalah sewa per tahun untuk menggantikan skema retribusi yang dianggap sudah tidak sesuai dan relevan dengan upaya Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan PAD dan menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja.

Pemkot Yogyakarta

Pemkot Yogyakarta telah melaksanakan sejumlah peraturan untuk mewujudkan akses internet murah kepada masyarakat dan mewujudkan *Smart City* Jogja, diantaranya:

- **Perda Kota No. 2 Tahun 2017 tentang Penataan menara BTS dan Kabel Fiber Optik**
- **Perda Kota No. 2 Tentang RTRW Kota Yogya**
- **Perda Kota No. 3 Tahun 2020 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;**
- **Perwali No. 100 Tahun 2018 tentang *Masterplan Pengembangan Smart City* Kota Yogyakarta Tahun 2018-2022.**

Skema tarif SJUT di Yogya saat ini memang **masih gratis** guna mempercepat proses *ducting* FO untuk estetika kota. Namun ke depan akan dikenakan sewa yang tidak memberatkan pengusaha



PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Daerah harus aktif dan Partisipatif

- Membuat peta tata ruang gelar infrastruktur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) dan secara konsisten melaksanakannya;
- Mendukung penyelenggaraan industri melalui penggelaran infrastruktur digital, khususnya jaringan telekomunikasi;
- Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penegakan aturan dalam penggelaran jaringan telekomunikasi;

➡ **Memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta meningkatkan keandalan layanan digital**





TERIMA KASIH